

BAB II

DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

SERTA GAMBARAN REDD+ DAN PROYEK *THE RIMBA RAYA*

BIODIVERSITY RESERVE

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan operasionalisasi konsep rezim internasional melalui pembahasan mengenai REDD+ sebagai *basic causal variables* dan *regimes* serta gambaran mengenai kondisi hutan serta laju deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di area hutan Kalimantan Tengah dan regulasi mengenai permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sebagai bentuk tingkah laku aktor dan *outcome* dari REDD+. Dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan operasionalisasi efektivitas rezim, yaitu *output*, dengan pembahasan pembentukan REDD+ di level internasional dan penerapan REDD+ di level domestik pada tingkat pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, penjelasan mengenai Proyek Rimba Raya yang menjadi salah satu proyek REDD+ juga akan dijelaskan dalam bab ini.

2.1 REDD+ sebagai Rezim Lingkungan Internasional

2.1.1 Proses Pembentukan dan Perkembangan REDD+

Pembahasan mengenai REDD, pertama kali diusulkan oleh Papua Nugini dan Kostarika yang menginginkan skema pembayaran kompensasi atau insentif bagi negara yang ingin dan mampu untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Papua Nugini dan Kostarika kemudian mengajukan dua opsi kerangka hukum

kedepan: pertama, membuat protokol tambahan yang khusus mengatur emisi dari deforestasi dan degradasi; kedua, mengembangkan lebih lanjut substansi yang terdapat dalam Protokol Kyoto dan *Marrakech Accords* dan tambahan penting mengenai proyek kredit karbon harus dibuat secara spesifik dikhususkan bagi isu deforestasi dan degradasi.³⁵ Usulan tersebut menjadi variabel dasar kausal dari pembentukan REDD+ sebagai sebuah rezim lingkungan internasional. Pada pertemuan ke 13 *Conference of the Parties* (COP) di Bali tahun 2007 silamkemudian menghasilkan *Bali Action Plan* atau Rencana Aksi Bali yang berisi tentang pengembangan skema dan proyek percontohan REDD.

Aktivitas REDD kemudian diperluas setahun setelah pertemuuan COP di Bali, tepatnya di Polandia menjadi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+) disepakati, pada pertemuan itu disepakati pula bahwa REDD tidak hanya suatu aksi yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, tetapi juga meningkatkan peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan persediaan karbon hutan di negara berkembang.³⁶ REDD+ menjadi harapan baru dalam menyelamatkan hutan yang mayoritas berada di wilayah negara berkembang, negara-negara berkembang yang mampu menjaga hutannya dengan setidaknya mengurangi emisi akibat dari deforestasi dan degradasi hutan serta mampu meningkatkan

³⁵Nurtjahjawilasa, dkk, 2013, *Konsep REDD+ dan Implementasinya*, Jakarta: The Nature Conservancy, hal 11-12.

³⁶ Asia Indigenous Peoples Pact, Forest Peoples Programme, dan International Work Group for Indigenous Affairs, 2012, *What is REDD+?: A Guide for Indigenous Communities (3rd edition)*, Thailand: AIPP Printing Press CO, Ltd, hal 36

cadangan karbon hutan maka negara tersebut akan mendapat insentif dari negara-negara maju yang merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu negara berkembang dalam menjaga hutannya.

REDD+ merupakan suatu rezim lingkungan internasional dan menjadi *ouput* dalam pengukuran efektivitas rezim. Sesuai dengan pengertiannya, rezim merupakan seperangkat aturan, norma, kaidah, serta prinsip-prinsip yang dibuat oleh instrumen legal dan telah disepakati secara multilateral oleh negara-negara untuk menentukan regulasi bagi tindakan nasional terhadap suatu isu atau fenomena internasional, dalam hal ini rezim lingkungan internasional yang berfokus pada isu atau fenomena yang menyangkut permasalahan lingkungan yang dapat berpengaruh bahkan mengancam dunia internasional secara global.

Sesuai dengan proses tahap pembentukan rezim lingkungan internasional yakni REDD+, terdapat empat tahap sebelum rezim tersebut memiliki kekuatan untuk dapat menjadi sebuah norma, kaidah atau prinsip, yaitu: (1) definisi isu, isu mengenai deforestasi dan degradasi hutan diangkat oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) tepatnya pada saat COP ke 13 tahun 2007 di Bali, (2) Proses penemuan fakta-fakta, pada pertemuan COP selanjutnya mediasi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam permasalahan deforestasi and degradasi hutan seperti, *Green Climate Fund* dan *Central African Forest Initiative*, (3) Proses tawar menawar, dalam proses ini di setiap pertemuan rutin tahunan UNFCCC, kemudian ide mengenai REDD+ dipromosikan oleh beberapa pemerintah negara di wilayah utara dan selatan dan NGO besar yang berbasis konservasi telah

terbentuk berbagai mekanisme dan skema REDD+ dengan kata lain sebagian besar negara telah menyetujui program REDD+ tersebut, (4) Proses penguatan rezim, dengan adanya pembaharuan dan perbaikan dalam metode pelaksanaan REDD+ setiap tahunnya dan hingga saat ini, negara-negara yang tergabung dalam *REDD Countries* mencapai lebih dari 30 lebih negara yang memiliki wilayah hutan tropis dan berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ dalam kebijakan nasionalnya.

Sebagai sebuah rezim lingkungan internasional, REDD+ tentunya memiliki seperangkat aturan yang terdapat dalam skema dan mekanisme REDD+ yang diperuntukkan bagi negara berkembang pemilik hutan tropis maupun bagi negara *annex 1*. Satu hal yang menjadi poin utama dalam REDD+ adalah mengenai *benefit sharing* dimana skema yang dibuat dalam REDD+ harus memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya, seperti yang telah diberlakukan saat ini mengenai pembayaran untuk jasa lingkungan atau *payments for environmental services* (PES) dalam tingkat nasional dan internasional.³⁷

Metode yang menjadi keunikan dalam REDD+ adalah metode *Measurement, Reporting and Verification* (MRV), dimana dalam metode tersebut dilakukan suatu pengukuran yang akurat mengenai daerah deforestasi dan degradasi hutan, menghitung jumlah stok karbon hutan serta menentukan jumlah emisi yang dikeluarkan akibat dari deforestasi dan degradasi hutan. MRV menjadi penting untuk

³⁷ Nurtjahjawilasa, dkk, 2013, *Konsep REDD+ dan Implementasinya*, Jakarta: The Nature Conservancy, hal 14

mengukur seberapa parah tingkat deforestasi dan degradasi di suatu negara serta kemajuan apa yang telah didapatkan setelah di implementasikannya REDD+.

2.1.2 Mekanisme dan Skema REDD+

REDD+ menjadi salah satu rezim lingkungan internasional yang dianggap memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan rezim-rezim yang telah ada sebelumnya. Seperti Protokol Kyoto, skema yang terdapat di dalamnya cenderung tidak memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang yang tidak tergabung dalam negara *annex 1*. Kelebihan REDD+ dapat terlihat secara nyata bahwa deforestasi dan degradasi hutan menyumbang seperlima dari jumlah keseluruhan emisi gas rumah kaca, REDD+ cenderung tidak menghabiskan terlalu banyak biaya jika dibandingkan dengan berbagai upaya mitigasi lainnya dan dapat menguntungkan secara marjinal, implementasi REDD+ mampu untuk mengurangi emisi dengan melakukan reformasi kebijakan-kebijakan dan tindakan yang tidak tergantung pada inovasi teknologi, REDD+ juga memberikan keuntungan dengan melihat pendapatan dengan jumlah yang cukup besar bagi negara berkembang dan juga memberi manfaat lingkungan selain yang berkaitan dengan iklim.³⁸

Namun dalam perkembangannya, mekanisme dan skema yang terdapat dalam REDD+ masih terus dibahas dan dikembangkan di setiap pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia atau *Conference of Parties*. Perkembangan mekanisme dan skema REDD+ tentunya harus mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi negara

³⁸*Ibid.*, hal 7.

mitra REDD+, mengingat mayoritas merupakan negara berkembang yang memiliki keterbatasan masing-masing disetiap negaranya. Terdapat enam komponen utama yang menjadi dasar atau acuan untuk mengimplementasi REDD+, komponen-komponen tersebut juga merupakan bahan dalam mekanisme dan skema yang terdapat dalam REDD+. Keenam komponen tersebut, meliputi:

1. *Management of Readiness* atau Pengelolaan Persiapan;

Dalam komponen ini, segala bentuk persiapan yang berkaitan dengan rancangan awal implementasi REDD+ berada. Terdapat rancangan koordinasi yang berkaitan dengan kesinergian koordinasi dalam setiap level, baik level internasional, nasional maupun sub-nasional, serta antara pemerintah dan *stakeholders* lainnya. Kemudian integrasi dan tendensi ketetapan dalam REDD+ pada rencana pembangunan, kebijakan, dan anggaran nasional. Dalam komponen ini juga mengharuskan untuk membentuk institusi yang mengatur setiap proses persiapan REDD+. Analisis mengenai pemetaan dan celah yang terkait dengan inisiatif REDD+ juga diperlukan untuk melihat peluang dan tantangan dari implementasi REDD+.

2. *Stakeholder Participation* atau Partisipasi *Stakeholder*;

Komponen ini memainkan peran penting untuk menentukan keberhasilan dari implementasi REDD+, tanpa adanya partisipasi dari pihak-pihak terkait yang mampu untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil tentunya proses implementasi REDD+ akan terhambat. Oleh karena itu, partisipasi *stakeholder* dalam hal ini dari tingkat internasional seperti bantuan dana luar negeri dari negara-negara *annex 1* dan organisasi-organisasi internasional, tingkat nasional, pemerintah pusat

dan daerah, dan tingkat sub-nasional seperti masyarakat lokal setempat. Dalam partisipasi *stakeholder* juga harus dibentuk sebuah mekanisme untuk resolusi konflik dan memberikan alternatif jalan lain jika terjadi permasalahan dalam upaya implementasi REDD+.

3. *REDD+ Strategy Setting* atau Pengaturan Strategi REDD+;

Pengaturan Strategi REDD+ menjadi komponen lanjutan dari pengelolaan persiapan, dalam komponen ini segala bentuk teknis persiapan REDD+ dibentuk dan dirancang. Bentuk persiapan tersebut berupa berbagai studi, analisis dan penilaian mengenai lokasi area proyek menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan rencana aksi kedepan implementasi REDD+. Melalui hal tersebut maka akan diketahui penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi serta melihat data historis laju defroestasi dan emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu area proyek. Menaksir jumlah biaya anggaran yang dibutuhkan dan jumlah yang akan dihasilkan dari proyek REDD+ untuk melihat seberapa besar keuntungan dan pengeluaran yang dibutuhkan. Pengaturan strategi ini dibuat dalam bentuk strategi nasional, yaitu yang dibuat oleh pemerintah pusat suatu negara untuk kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membuat strategi daerahnya sendiri. Pembuatan kebijakan dan institusi yang secara khusus mengenai REDD+ juga dibutuhkan untuk memperkuat pengaruh dan efektivitas dari impleemntasi REDD+.

4. *Reference Levels*;

Reference Levels biasa disebut dengan *Reference Emission Levels* (REL) atau *Forest Reference Emission Levels* (FREL) merupakan jumlah emisi bersih atau

kotor dan (penghilangan) dari sebuah area geografis dalam periode waktu tertentu, dengan kata lain *reference levels* mengacu pada jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu wilayah hutan sebelum adanya REDD+. Penghitungan *reference levels* juga dijadikan acuan untuk melihat keadaan hutan suatu negara. Jumlah tersebut didapatkan melalui data historis laju deforestasi hutan dalam jangka waktu tertentu. Melalui data tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan hutan serta menentukan basis investarisasi dari jumlah wilayah tutupan hutan dan jumlah stok karbon yang akan dihasilkan. Metode yang digunakan dalam menghitung *reference levels* yaitu data historis berupa tren serta perubahan hutan yang terjadi dan proyeksi model atau data historis dengan menggunakan proyeksi untuk menentukan target dari jumlah emisi yang akan dihindarkan setelah diterapkannya REDD+.

5. *REDD+ Implementation Framework* atau Kerangka Implementasi REDD+;

Komponen ini mencakup rancangan implementasi REDD+ yang kredibel dan transparan, dimana terdapat sistem manajemen REDD+ dengan multi *stakeholder* sebagai pihak yang memiliki hak dan tanggungjawab untuk dapat menentukan kerangka implementasi yang tepat dan sesuai dengan area proyek REDD+. Dalam komponen ini, sistem distribusi yang menguntungkan dikembangkan, dengan berbagai pilihan, hak karbon, rancangan dan perjanjian dalam sistem tersebut guna mendapatkan keuntungan bersama (*benefit sharing*). Kerangka legal dengan mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan guna mempermudah proses implementasi REDD+.

6. *Monitoring, Reporting dan Verification (MRV)*³⁹

Komponen mengenai MRV ini menjadi salah satu keunikan dari REDD+, metode MRV dapat menentukan sejauh mana suatu negara mampu untuk mengurangi tingkat emisi karbonnya. Sistem MRV ini dapat dilakukan melalui data yang diperoleh melalui satelit dan data hutan yang meliputi inventarisasi hutan dan penaksiran jumlah karbon. Data yang diperoleh melalui MRV ini akan menjadi acuan untuk menentukan jumlah insentif yang didapatkan oleh suatu negara dalam upayanya untuk mengurnagi tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari sektor kehutanan. MRV juga tidak hanya mengamati perubahan hutan tetapi juga sosial dan lingkungan sekitar yang terdampak dengan adanya REDD+.

Secara garis besar, terdapat tiga fase yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dan penempatan suatu aktor dalam proses implementasi REDD+. Menurut AIPP dan IWGIA, keputusan dalam REDD+ telah merumuskan proses implementasi REDD+ dalam beberapa fase, diantaranya:

1. Fase pertama (Fase Persiapan): dalam fase ini strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan pengukuran sudah harus ditetapkan, bahkan jika diperlukan untuk mengubah dan membuat hukum baru di negaranya. Fase ini dapat dikatakan menjadi fase paling penting karena dibutuhkan kapasitas,

³⁹Josep, A. Gari, 2011, *The REDD+ Mechanism and REDD+ Readiness*, Zambia REDD+ Orientation Workshop diakses dalam <http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-mechanism-5611.html> (14/12/2017, 18:13 WIB)

komitmen dan kemauan besar dari suatu negara untuk dapat memulai, merubah dan mulai menerapkan REDD+.

2. Fase kedua (Fase Implementasi): pada fase ini, kebijakan nasional dan pengukuran serta strategi nasional atau rencana yang telah dipersiapkan pada fase persiapan sudah harus di implementasikan. Implementasi tersebut termasuk bagaimana *pilot projects* yang telah di tunjuk oleh pemerintah untuk mengimplementasikan REDD+ ke dalam praktek secara langsung. Diperkenalkan sistem pengukuran, laporan dan verifikasi (MRV), dengan mengukur tingkat karbon, melaporkan apa yang telah diukur dan diteliti, dan memproses hasil laporan bahwa telah sesuai dengan pengukuran dan laporan yang benar.
3. Fase ketiga (Fase Perhitungan): fase ini merupakan fase akhir ketika REDD+ telah sepenuhnya diimplementasikan dan ketika seluruh hasil diharapkan diukur seperti dalam *pilot projects* yang telah dilakukan dalam fase implementasi. Fase ini dikatakan sebagai “*book-keeping*” berapa karbon yang didapatkan, berapa banyak emisi karbon yang dijaga dan berapa banyak disimpan. Sistem MRV sepenuhnya harus diaplikasikan, dalam fase ini juga menentukan berapa banyak jumlah kompensasi yang diberikan untuk setiap kegiatan-kegiatan REDD+ yang telah dilakukan.⁴⁰

⁴⁰ Asia Indigenous Peoples Pact, Forest Peoples Programme, dan International Work Group for Indigenous Affairs, 2012, *What is REDD+?: A Guide for Indigenous Communities (3rd edition)*, Thailand: AIPP Printing Press CO, Ltd, hal 61-62

Enam komponen utama yang terdapat dalam mekanisme dan skema REDD+ terbagi kedalam tiga fase tersebut, untuk fase pertama atau fase persiapan yaitu komponen pengelolaan persiapan REDD+, partisipasi *stakeholder*, dan pengaturan strategi REDD+. Fase kedua atau fase implementasi meliputi komponen *reference levels* dan kerangka implementasi, sedangkan fase ketiga atau fase perhitungan yaitu *monitoring, reporting* dan *verification*.

2.2 Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah

Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah termasuk kedalam salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, turut berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah emisi dunia. Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah hutan terbesar ketiga di Indonesia dan kedua terbesar di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah hutan sebesar 12,7 juta hektar dari total keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah seluas 15,4 juta hektar, yang terdiri dari: (1) Kawasan Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan, seluas 3,8 juta hektar; (2) Hutan Produksi Konversi (HPK) yang merupakan kawasan hutan produksi tidak produktif dan produktif yang dapat digunakan sebagai cadangan ruang pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan luas 2,5 juta hektar; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3,3 juta hektar, HPT adalah kawasan hutan yang menjadi basis produksi dengan intensitas rendah melalui sistem tebang pilih, kawasan hutan ini merupakan wilayah yang memiliki lereng, jenis tanah

dan intensitas hujan dengan jumlah tertentu; (4) Hutan Konversi (HK) seluas 1,6 juta hektar yang merupakan kawasan hutan yang digunakan untuk berbagai macam tujuan dan pembangunan diluar kegiatan kehutanan; (5) Hutan Lindung (HL) merupakan kawasan hutan yang dijadikan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan guna mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah dengan luas 1,3 juta hektar.⁴¹

Berdasarkan jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah Kalimantan Tengah menggunakan sebagian besar wilayah hutannya untuk dijadikan sebagai basis produksi. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah, penggunaan sebagian besar kawasan hutan untuk basis produksi dirasa menjadi salah satu cara memanfaatkan hutan untuk mendapatkan nilai ekonomis dan keuntungan dengan biaya rendah tanpa memikirkan dampak berkelanjutan dari hal tersebut. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam melimpah dan berkontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian daerah, tidak hanya dalam sektor pertambangan melainkan juga sektor pertanian dan kehutanan. Kelapa sawit memiliki kontribusi cukup besar, yaitu sebesar 25% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah, ironisnya 85% wilayah produksi kelapa sawit

⁴¹ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016, *Luas Kawasan Hutan Kalimantan Berdasarkan SK. 529*, diakses dalam <http://dishut.kalteng.go.id/berita/read/9/luas-kawasan-hutan-kalimantan-berdasarkan-sk-529> (3/5/2017, 13.45 WIB)

tersebut dikelola oleh perusahaan swasta sedangkan sisanya milik petani yang turut bekerjasama dengan perusahaan tersebut.⁴²

Melihat besarnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah Kalimantan Tengah, ternyata menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan semakin meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan akibat dari perluasan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Wilayah hutan di Kalimantan Tengah terdiri dari area hutan rawa gambut yang memiliki peran penting dalam mencegah semakin meningkatnya emisi gas CO₂, karena hutan rawa gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon.

Deforestasi dan degradasi hutan tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, pemanasan global dan berbagai dampak lingkungan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari INCAS⁴³, total emisi tahunan gas rumah kaca dari hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 121.726.817 tCO₂-eq pada tahun 2012 yang mengalami kenaikan dari jumlah total emisi sebelumnya pada tahun 2010 yang hanya mencapai 97.218.868 tCO₂-eq.⁴⁴ Kenaikan jumlah emisi gas rumah kaca tersebut tidak lain disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang

⁴² Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementrian PPN/Bappenas, dan Global Green Growth Institute, 2015, *Kalimantan Tengah: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau*, hal 10

⁴³ INCAS atau singkatan dari *International National Carbon Accounting System* merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup untuk menghitung dan memantau perkembangan tingkat emisi karbon di Indonesia, INCAS dibentuk atas bantuan dari pemerintah Australia (AusAid) dalam upayanya untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. (penjelasan diolah dari Indonesian National Carbon Accounting System, *Penjelasan Umum INCAS* dalam <http://www.incas-indonesia.org/id/about/incas-overview>)

⁴⁴ INCAS Indonesia, diakses dalam <http://www.incas-indonesia.org/id/data/central-kalimantan/> (4/5/2017, 18.13 WIB)

memanfaatkan hutan dengan tidak mengedepankan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, alhasil deforestasi dan degradasi hutan dengan cara pembukaan lahan melalui cara pembakaran dan penebangan pohon secara masif menjadi cara yang dianggap lebih efektif untuk mengalih fungsikan hutan sebagai area perkebunan.



Gambar 2.1 Deforestasi Hutan Kalimantan Tengah

Sumber: Lili Rambe, *Foto: Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit*, diakses dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-terkini-akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/> (09/02/2018,13:24 WIB)

Melalui gambar tersebut, dapat terlihat bahwa kondisi hutan Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Tengah yang hutannya semakin terkikis dan telah beralih menjadi area perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri tercatat masuk kedalam kategori daerah yang melakukan deforestasi tertinggi dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya. Dalam deforestasi fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) Kalimantan Tengah menduduki peringkat kedua setelah Riau

dengan jumlah deforestasi sebesar 21.536,0 hektar per tahun, kemudian deforestasi pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kalimantan Tengah juga menduduki peringkat kedua setelah Riau yaitu sebesar 8.516,2 hektar per tahun, deforestasi tertinggi pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) terjadi di wilayah Kalimantan Tengah dengan jumlah 14.674,1 hektar per tahun.⁴⁵ Deforestasi yang terjadi ternyata menimbulkan permasalahan baru, lahan gambut yang seharusnya ditanami oleh pepohonan tropis telah di konversi menjadi lahan perkebunan yang membuat lahan gambut menjadi kering, sehingga tidak dapat terelakkan jika pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pembakaran lahan yang menyebar luas dan sulit untuk dipadamkan.

Pada bulan Agustus tahun 2016 saja, total luas lahan yang terbakar mencapai 100 hektare lebih, wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau adalah Kabupaten Pulau Pisau, Barito Selatan, Kota Palangkaraya, dan Kapuas karena lahan gambut yang berada di daerah tersebut sudah mulai kering.⁴⁶ Akibatnya permasalahan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan menjadi permasalahan yang setiap tahunnya dialami oleh sebagian besar wilayah hutan di Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah sebesar 1.670.040,76 hektar atau sekitar

⁴⁵ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016, *Luas Kawasan Hutan Kalimantan Berdasarkan SK. 529*, diakses dalam <http://dishut.kalteng.go.id/berita/read/9/luas-kawasan-hutan-kalimantan-berdasarkan-sk-529> (3/5/2017, 13.45 WIB)

⁴⁶ Rjana, K, *100 Hektare Lahan Kalteng Hangus Terbakar Agustus Ini*, diakses dalam <https://m.liputan6.com/amp/2581920/100-hektare-lahan-kalteng-hangus-terbakar-agustus-ini> (13/2/2018, 20:15 WIB)

11,6% dari keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah.⁴⁷ Sedangkan luas wilayah hutan Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 adalah 1.640.400,05 hektar yang terbagi dalam klasifikasi taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi dan areal penggunaan lainnya.⁴⁸ Berdasarkan jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Seruyan adalah area hutan yang cukup luas. Luas hutan tersebut di dominasi oleh beberapa jenis kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 428.662,93 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 383.095,31 hektar dan Hutan Konservasi dengan luas 170.988,08 hektar.⁴⁹ Meskipun luas wilayah hutan Seruyan sebagian besar di manfaatkan untuk basis produksi dan sektor perkebunan, dengan pengelolaan yang baik dan mengedepankan prinsip hutan yang berkelanjutan, lahan gambut serta area konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan mangrove yang terdapat di daerah Seruyan kondisinya masih tetap terjaga dan mampu untuk menjadi *buffer zone* bagi wilayah Kalimantan Tengah.

⁴⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, *Geografis Kabupaten Seruyan*, diakses dalam <https://seruyankab.go.id/profil/geografis-kab-seruyan> (08/02/2018,14:24 WIB)

⁴⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, *Perkebunan dan Kehutanan*, diakses dalam <https://seruyankab.go.id/pembangunan/perkebunan-kehutanan> (08/2/2018,14:30 WIB)

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, *Luas Hutan Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah Perda No. 08 Tahun 2003*, diakses dalam <https://seruyankab.bps.go.id/statictable/2016/03/23/32/luas-hutan-kabupaten-seruyan-berdasarkan-rtrwp-kalimantan-tengah-perda-no-08-tahun-2003.html> (08/2/2018,22:16 WIB)

2.3 Kebijakan Pemerintah Terhadap Permasalahan Deforestasi dan Degradasi Hutan

2.3.1 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tingkah laku aktor dan *outcomes* atas respon terhadap rezim internasional yaitu REDD+ terlihat dalam pengaturan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam beberapa peraturan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009, deforestasi merupakan perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 juga diatur tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, dimana dalam rangka pencegahan kerusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan, insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, peta penunjukkan kawasan hutan dan/atau

⁵⁰Kementerian Kehutanan, *Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)*, P.30/Menhut-II/2009, Ps. 1.

koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan, dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁵¹

Peraturan Undang-Undang tersebut juga mencakup larangan terkait dengan kegiatan atau pun hal-hal yang dapat merusak hutan, baik berupa alih fungsi hutan, pengelolaan hutan, dan kegiatan perkebunan di area hutan tanpa izin. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan membentuk gerakan anti perusakan hutan, meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan menjaga hutan, memberi informasi kepada pihak berwenang yang berkaitan dengan perusakan hutan, serta berbagai cara lainnya yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan juga dapat terlihat dari komitmen Indonesia dalam keikutsertaannya untuk menjadi negara mitra REDD+. Indonesia telah sepakat dan bersedia untuk mengimplementasikan proyek-proyek REDD+ yang tersebar diseluruh wilayah hutan Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa peraturan sebagai pedoman bagi aktor sub nasional dan daerah yang berkaitan dengan implementasi REDD+ di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah membuat peraturan tersendiri mengenai permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang berkaitan dengan REDD+.

⁵¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahann dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, PS. 6.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang berisi mengenai ketentuan, ketetapan dan aturan dalam menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi, dan institusi pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.⁵² Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) sebagai pedoman nasional bagi aktor sub-nasional dalam mengimplementasikan REDD yang mencakup persyaratan dalam pengajuan area REDD, penetapan referensi emisi, pemantauan dan pelaporan, serta ketentuan pemberian rekomendasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan REDD. Aturan lainnya juga terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan pembentukan Kelembagaan REDD+ yang berisi mengenai penetapan susunan keanggotaan Satgas REDD+ untuk mendukung, menyusun, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis dari implementasi REDD+ di Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

⁵²Kementerian Kehutanan, *Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan*, P.68/Menhut-II/2008, Ps. 2.

2.3.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai REDD+ menjadi bentuk respon dari level domestik pemerintah untuk meimplementasikan REDD+. Kemudian, kebijakan dan peraturan tersebut diturunkan pada tingkat daerah untuk memberikan respon perubahan perilaku aktor pada level sub-nasional terhadap rezim internasional, dalam hal ini adalah REDD+. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi percontohan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ pada kebijakan daerahnya.

Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki area hutan sekitar 12,7 hektar juga tak luput dari permasalahan deforestasi dan degradasi hutan. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, Kalimantan Tengah berpotensi besar untuk menghasilkan emisi karbon yang dihasilkan dari alih fungsi hutan dengan cara yang tidak mengedepankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam melihat permasalahan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah peraturan yang berisi ketentuan dan pedoman bagi daerah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk melakukan pembangunan serta melakukan kegiatan perekonomiannya dengan mengedepankan prinsip untuk peduli terhadap lingkungan dan memelihara hutan melalui *Green Government Policy* (GGP) dengan memadukan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, yang meliputi: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan, (2) penataan ruang, konservasi, penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis, (3) perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, (4) penyediaan air bersih dan sanitasi, kualitas udara dan hotspot, (5) pengelolaan sampah, dan (6) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.⁵³

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Kalimantan Tengah menjadikan lingkungan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan setiap langkah proses pembuatan kebijakan daerahnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemerintah daerah Kalimantan Tengah juga membuat kebijakan *green and clean province* sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara hutan beserta sumberdaya alam didalamnya, maka akan memunculkan inisiatif maupun inovasi yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan deforestasi, perubahan iklim, dan segala bentuk bencana alam yang mungkin dapat terjadi akibat dari dampak kerusakan lingkungan.

Kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengedepankan aspek lingkungan dapat terlihat melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), yang merupakan program pengentasan desa-desa tertinggal yang umumnya berada di dalam atau disekitar kawasan hutan, dengan adanya program pengentasan desa tertinggal tentunya juga akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang lebih baik oleh masyarakat setempat;

⁵³ Tim Pengkayaan Strada REDD+ Kalteng, 2013, *Strategi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah*, Palangkaraya, hal 15.

(2) Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (GEBER MLT), yaitu program pengoptimalan lahan-lahan terlantar atau lahan tidur yang berada di kiri-kanan jalan, sungai dan danau dengan pemanfaatan berbasis pertanian dan kehutanan; (3) Bulan Menanam Pohon, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang ditindak lanjuti oleh pemerintah Kalimantan Tengah guna meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara luas akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (4) Kalteng HARATI, merupakan program peningkatan kecerdasan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pula terhadap sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih baik.⁵⁴

Berkenaan dengan permasalahan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menunjuk Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+. Terpilihnya provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada kombinasi hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai pertimbangan yang dibahas dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2010, pertimbangan tersebut diantaranya adalah Kalimantan Tengah sebagai provinsi ketiga yang memiliki area tutupan hutan serta kawasan gambut terluas di Indonesia dan mengalami permasalahan deforestasi dan kerusakan gambut secara nyata, tingkat kesiapan dan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengimplementasikan REDD+ juga menjadi acuan bagi terpilihnya Kalimantan

⁵⁴*Ibid.*, hal 16

Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+. ⁵⁵ Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur tersebut merupakan sebuah bentuk rancangan dan persiapan Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi Strategi Daerah, Program dan Rencana Aksi sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan REDD+ di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah yang tersebar di tiga belas wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Seruyan menjadi salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang memiliki luas hutan cukup luas dan dimanfaatkan untuk kegiatan produksi maupun konservasi. Hasil sumber daya alam yang berasal dari hutan menjadi sektor andalan pendapatan daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengupayakan pemanfaatan yang bijak dan arif maka pengelolaan hasil kehutanan tersebut mampu dikelola secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. ⁵⁶ Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk mengubah pengelolaan hutan yang semula hanya berorientasi pada kayu menjadi pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh

⁵⁵ Provinsi Kalimantan Tengah, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015*, Perda No. 1 tahun 2011, bab 4, hal 12.

⁵⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, *Perkebunan dan Kehutanan*, diakses dalam <https://seruyankab.go.id/pembangunan/perkebunan-kehutanan> (08/2/2018, 14:30 WIB)

sumber daya kehutanan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat secara luas.

2.4 Gambaran Umum *The Rimba Raya Biodiversity Reserve*

The Rimba Raya Biodiversity Reserve atau yang lebih dikenal dengan Rimba Raya merupakan sebuah proyek yang diinisiasi oleh sebuah perusahaan firma asal Hongkong yaitu InfiniteEarth yang diwakilkan oleh PT Rimba Raya Conservation. Proyek Rimba Raya menawarkan cara alternatif dalam memanfaatkan nilai ekonomis yang dimiliki hutan. Jika kebanyakan program konservasi ataupun kegiatan restorasi lingkungan berbasis non-profit, Rimba Raya menawarkan program konservasi dengan basis profit, itulah yang menjadi nilai tawar proyek ini yang berbeda dari proyek lainnya. Proyek ini menggunakan mekanisme yang terdapat dalam REDD+ dalam menjalankan dan menerapkan setiap program-programnya bagi masyarakat sekitar maupun bagi lingkungan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi emisi akibat dari adanya deforestasi dan degradasi hutan.

The Rimba Raya Biodiversity Reserve diinisiasikan pada tahun 2008, butuh waktu dan proses yang lama bagi Rimba Raya untuk mendapatkan pengakuan dan perijinan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Indonesia. Bekerjasama dengan organisasi internasional yaitu Orangutan Foundation International dan World Education, yang telah memiliki pengalaman dan pengakuan dari tingkat nasional hingga internasional menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Rimba Raya untuk melakukan pendekatan pada masyarakat dan pemerintah mengenai visi dan misinya

dalam konservasi hutan berbasis profit. *The Rimba Raya Biodiversity Reserve* melindungi wilayah zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar wilayah Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cakupan area proyek seluas 64,977 hektar, dalam proyek tersebut tidak hanya berfokus pada konservasi guna mengurangi emisi dari adanya deforestasi dan degradasi hutan melainkan lebih dari itu, Rimba Raya juga berkomitmen untuk melindungi satwa flora dan fauna endemik yang terdapat di dalamnya.⁵⁷



Gambar 2.2 Model Penyangga Fisik dan Sosial Proyek Rimba Raya

Sumber: *The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project Design Document; REDD: Avoided (Planned) Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia*, Scientific Certification Systems, hal 20.

Lokasi proyek Rimba Raya berada di sekeliling area yang dilindungi, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting serta berbatasan langsung dengan area organisasi-organisasi non pemerintah dan pemukiman masyarakat lokal. Melalui lokasi yang berbatasan dengan beberapa *stakeholder*, yang menjadi pendukung proyek rimba raya

⁵⁷ Fact Sheet Rimba Raya Biodiversity Reserve: Central Kalimantan, Borneo, Indonesia.

untuk mampu membuat sistem *self-sustaining* dengan memanfaatkan penjualan karbon serta manajemen zona penyangga fisik dan sosial. Proyek Rimba Raya menjadi area penyangga antara Taman Nasional dan perkebunan kelapa sawit untuk menjaga stok karbon yang dihasilkan dari taman nasional. Keberadaan Proyek Rimba Raya juga mampu untuk menjadi area penyangga sosial bagi masyarakat lokal untuk mampu mengelola hutan yang berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat lokal.

Prinsip dasar dan pedoman *The Rimba Raya Biodiversity Reserve* dalam menjalankan setiap program-programnya adalah “*Carbon Neutral and Sustainable are simply not enough*”, artinya upaya menetralkan emisi karbon dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang saat ini tengah dicanangkan terutama oleh PBB dirasa tidak cukup untuk menyelamatkan bumi ini dari ancaman pemanasan global dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya, InfiniteEarth percaya jika saat ini kita tengah berhutang pada kehidupan kelak bagi anak cucu kita dan generasi di masa depan yang membutuhkan lebih dari sekedar masa depan yang berkelanjutan.⁵⁸ Oleh karena itu, *The Rimba Raya Biodiversity Reserve* dalam dokumen rancangan proyeknya (PDD) telah membuat 6 mandat yang membedakan proyek ini dengan proyek REDD+ lainnya, mandat tersebut diantaranya:

⁵⁸ Todd Lemons, dkk, 2011, *The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided (Planned) Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia*, Scientific Certification Systems, Hal 19

1. Double Offset

Proyek Rimba Raya dirancang untuk dapat menyimpan karbon 2 kali dari jumlah karbon yang akan dijual dalam kredit karbon, sebagai bentuk komitmennya menuju *Beyond Carbon Neutral and Beyond Sustainability*.

2. Protection in Perpetuity

Proyek Rimba Raya akan membuat yayasan non-profit yang didanai dari sebagian hasil persentase keuntungan pertahunnya, jumlah keuntungan tersebut diharapkan mampu untuk mencukupi pendanaan proyek bahkan melebihi 30 tahun berjalannya proyek Rimba Raya.

3. Social Programs to meet UN Millenium Goals

Proyek program-program sosial dirancang untuk mencapai ke delapan *UN Millenium Development Goals* (MDGs) dalam Proyek Rimba Raya pada tahun 2015. Kini, Rimba Raya telah berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

4. Conservation of Endangered Wildlife and Habitat

Proyek ini harus menyediakan habitat setidaknya bagi satu spesies yang terancam punah. *The Rimba Raya Biodiversity Reserve* melindungi lebih dari enam spesies mamalia yang terancam punah dan lebih dari ratusan spesies flora dan fauna yang rawan.

5. Positive Leakage via Protection of a National Park.

Idealnya, area proyek haruslah berdekatan dengan Taman Nasional untuk membentuk area penyangga untuk mencegah terjadinya kebocoran positif, dengan menyediakan pembatas fisik dan sosial dalam area tersebut

6. Partnership with a Local Conservation Group (NGO)

Proyek Rimba Raya akan dirancang untuk membantu menjalankan kinerja dari kelompok konservasi dalam setiap program-program yang akan dijalankan.⁵⁹

Keenam mandat tersebut menjadi nilai-nilai dasar dalam setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh *The Rimba Raya Biodiversity Reserve*. Selain berfokus pada konservasi hutan dan perlindungan terhadap biodiversitas yang ada didalamnya, proyek Rimba Raya juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar yang berbatasan langsung dengan area proyek. Terdapat setidaknya 14 desa di wilayah selatan Kabupaten Seruyan yang mendapat program pemberdayaan dari Rimba Raya.

Pemberdayaan kepada masyarakat menjadi penting karena seringkali proyek konservasi dan berbagai program restorasi lainnya mengabaikan peran masyarakat sekitar untuk turut serta dalam proyek tertentu, alhasil masyarakat pun menjadi kesulitan untuk mengakses hutan sebagai sumber mata pencahariannya akibat dari pembatasan yang dilakukan oleh proyek tertentu. Oleh karena itu, Rimba Raya berusaha untuk memberikan program-program yang mampu memberdayakan dan

⁵⁹*Ibid.*

meningkatkan peran langsung masyarakat dalam setiap kegiatan dalam proyek *The Rimba Raya Biodiversity Reserve*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa dalam bab ini, operasionalisasi konsep rezim internasional yaitu, *basic causal variables* terdapat pada pengusulan pembahasan mengenai skema pemberian insentif bagi negara yang ingin dan mampu untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan oleh Papua Nugini dan Kostarika. Kemudian untuk *regimes*, terdapat perkembangan pembentukan REDD+ mulai dari pertemuan COP ke-13 di Bali yang merumuskan skema dan proyek percontohan REDD, hingga perluasan aktivitas REDD+ dengan penambahan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan stok karbon hutan yang disepakati pada saat pertemuan COP di Polandia. Perubahan tingkah laku aktor dan *outcomes* berupa respon pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ kedalam kebijakan dan peraturan nasionalnya juga menjadi bentuk respon domestik terhadap kesepakatan rezim internasional. perilaku tingkah laku aktor tersebut bahkan juga diturunkan hingga pada level sub-nasional dengan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengimplementasikan REDD+ dalam peraturan dan kebijakan daerahnya.

Operasionalisasi konsep efektivitas rezim juga dijelaskan dalam bab ini, yaitu *output*, di mana terdapat pembahasan mengenai proses pembentukan REDD+ di level internasional, hingga respon domestik yaitu pemerintah nasional Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ pada kebijakan dan peraturan daerahnya. Untuk

melihat implementasi REDD+ dalam proyek Rimba Raya, yang merupakan operasionalisasi dari konsep efektivitas rezim, yaitu *outcomes*, maka dalam bab selanjutnya akan diuraikan mengenai tahapan implementasi ke enam komponen yang terdapat dalam REDD+ dalam Proyek Rimba Raya. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, keenam komponen, yang terdiri dari pengelolaan persiapan REDD+, kerangka implementasi, pengaturan strategi REDD+, *reference level*, partisipasi *stakeholder*, dan sistem MRV termasuk kedalam mekanisme dan skema utama yang terdapat dalam REDD+.

